



Analisis Pengendalian Internal Utang Usaha dalam Perspektif COSO Framework

Eprilia Eka Yuniasis, Endah Susilowati*

Akuntansi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Indonesia

Email: 123013010066@student.upnjatim.ac.id, 2*endahs.ak@upnjatim.ac.id

Abstract. *The aim of this research is to examine the internal management of accounts payable within PT XYZ based on the COSO Framework. The research utilizes a case study approach paired with a qualitative methodology. Data collection involved observations, interviews, and the review of documents. The result indicate that PT XYZ's internal accounts payable control has, for the most part, been implemented successfully and in accordance with the five elements of the COSO which are control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring activities. The study found a clear segregation of duties between the Accounting Division and the Finance Division, comprehensive document verification procedures, and continuous monitoring of transactions. In addition, the Invoice Examination Summary (IPT) serves as a key internal control instrument that supports document verification, accounting records, communication of information, and transaction traceability. However, the accounts payable process continues to be carried out manually with the aid of Microsoft Excel and is not supported by an integrated accounting information system, creating a risk of administrative errors and increasing dependence on employee accuracy.*

Keywords: *Accounts Payable; COSO Framework; Internal Control; Invoice Verification; Invoice Examination Summary (IPT)*

Abstrak. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengevaluasi pengawasan internal terhadap utang usaha di PT XYZ yang mengacau COSO Framework. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif menggunakan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara, dan kajian dokumen. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal PT XYZ terkait utang usaha secara umum telah berhasil diterapkan dan sejalan dengan lima elemen COSO, yaitu lingkungan pengendalian, analisis risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta kegiatan pemantauan. Studi ini menunjukkan adanya perbedaan fungsi yang signifikan antara Divisi Akuntansi dan Divisi Keuangan, prosedur verifikasi dokumen yang komprehensif, serta pemantauan transaksi yang dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, Ikhtisar Pemeriksaan Tagihan (IPT) berperan sebagai instrumen pengendalian internal yang mendukung proses verifikasi dokumen, pencatatan akuntansi, komunikasi informasi, dan penelusuran transaksi. Namun demikian, proses verifikasi dan pencatatan utang usaha masih dikerjakan secara manual dengan memanfaatkan Microsoft Excel dan belum didukung oleh sistem informasi akuntansi yang terintegrasi, sehingga masih terdapat risiko kesalahan administratif dan ketergantungan pada ketelitian pelaksana.

Kata kunci: Utang Usaha; COSO Framework; Pengendalian Internal; Verifikasi Tagihan; Ikhtisar Pemeriksaan Tagihan (IPT)

1. LATAR BELAKANG

Pengelolaan kewajiban perusahaan, khususnya utang usaha, merupakan salah satu aspek fundamental dalam menjaga keberlangsungan dan kesehatan finansial perusahaan. Menurut Putra & Nuryatno (2022), setiap perusahaan melakukan kegiatan pengadaan yang menimbulkan utang usaha. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengendalian internal

Received: June 22, 2026; Revised: June 27, 2026; Accepted: July 03, 2026; Published: August 31, 2026

**Corresponding author, e-mail address*

untuk memastikan bahwa setiap transaksi utang dicatat secara tepat, memperoleh otorisasi yang sesuai, serta diproses berdasarkan kebijakan yang berlaku.

Akil dkk. (2025) menyatakan bahwa salah satu faktor terpenting dalam membantu suatu perusahaan mencapai tujuannya adalah pengendalian internal. Hal ini berfungsi sebagai perlindungan aset, menjamin ketepatan informasi keuangan, menyederhanakan kinerja operasional, serta mendorong ketaatan terhadap peraturan dan kebijakan yang ada. Selaras dengan pendapat tersebut, Latha & Suarjana (2026) mengemukakan bahwa praktik yang baik, dokumen dan catatan akuntansi yang dapat diandalkan, prosedur otorisasi, serta uraian tugas untuk fungsi-fungsi terkait merupakan contoh-contoh pengendalian internal yang efektif. Lemahnya pengendalian internal pada proses utang usaha dapat mengakibatkan pembayaran ganda kepada vendor, kesalahan pencatatan, kesalahan perhitungan pajak, hingga manipulasi data keuangan.

Berbagai studi terdahulu telah melihat pengendalian internal utang usaha dari berbagai perspektif. Setyawati dkk. (2024) menganalisis efektivitas pengendalian internal dalam pembayaran utang kepada pemasok di lingkungan perhotelan dan menemukan bahwa pemisahan fungsi antara pencatatan dan pembayaran merupakan faktor kunci dalam meminimalkan risiko kecurangan. Manzala & Tannar (2024) meneliti bagaimana pengendalian internal terhadap pencatatan pengeluaran kas yang terkait dengan utang telah terotomatisasi dan menemukan bahwa otomatisasi sistem berkontribusi signifikan terhadap keandalan pencatatan. Yusmi & Sumarna (2023) mengusulkan proses bisnis berbasis pengendalian internal guna mengurangi keterlambatan pembayaran utang vendor, dengan menekankan pentingnya standarisasi prosedur dan dokumentasi. Saniyyah dkk. (2024) mengkaji proses pencatatan utang usaha pada divisi *account payable* dan menemukan bahwa kelengkapan dokumen pendukung menjadi penentu utama keberhasilan proses verifikasi tagihan. Siboro & Sundari (2025) mengidentifikasi berbagai tantangan dalam sistem pembayaran utang usaha yang berkaitan dengan keterlambatan dokumen dari vendor dan ketidaksesuaian data transaksi.

Penelitian-penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam memahami pengendalian internal utang usaha, tetapi masih terdapat beberapa celah yang belum sepenuhnya terjawab. Pertama, mayoritas penelitian berfokus pada sistem yang telah terotomatisasi atau berbasis teknologi informasi, sedangkan kajian mengenai

perusahaan yang masih mengandalkan proses verifikasi dan pencatatan secara manual menggunakan Microsoft Excel masih relatif terbatas. Kedua, penelitian terdahulu belum banyak mengkaji mekanisme pengendalian internal yang dikembangkan secara internal oleh perusahaan untuk mendukung proses verifikasi tagihan sebelum pencatatan utang dilakukan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa PT XYZ menerapkan Ikhtisar Pemeriksaan Tagihan (IPT) sebagai dokumen pengendalian internal yang disusun berdasarkan kebutuhan perusahaan. IPT bukan merupakan dokumen yang diwajibkan dalam COSO *Internal Control-Integrated Framework* maupun standar akuntansi, melainkan kebijakan internal perusahaan yang berfungsi memperkuat proses verifikasi tagihan dan pencatatan utang sebelum pembayaran dilakukan. Oleh karena itu, kajian mengenai peran IPT sebagai mekanisme pengendalian internal masih sangat terbatas dalam literatur akademik. Ketiga, analisis pengendalian internal utang usaha secara komprehensif menggunakan kerangka COSO yang mencakup seluruh lima komponen pengendalian secara holistik pada konteks utang usaha perusahaan menengah di Indonesia masih relatif jarang dilakukan.

Kesenjangan tersebut ditemukan pada PT XYZ, yaitu perusahaan manufaktur yang mengolah gas alam (*natural gas*) menjadi gas hidrogen (H_2) di Indonesia. Tingginya aktivitas pengadaan barang dan jasa menyebabkan perusahaan memiliki volume transaksi utang usaha yang signifikan. Berdasarkan observasi selama magang, proses pengelolaan utang usaha pada PT XYZ melibatkan berbagai tahapan, mulai dari verifikasi tagihan, penyusunan Ikhtisar Pemeriksaan Tagihan (IPT), pencatatan utang, hingga proses pembayaran kepada vendor. Setiap tahapan tersebut mengandung risiko yang dapat memengaruhi keandalan informasi keuangan apabila tidak didukung oleh sistem internal kontrol yang memadai.

Berdasarkan pembahasan di atas, penelitian ini bermaksud menganalisis sistem pengendalian internal atas utang usaha pada PT XYZ yang menggunakan Kerangka Kerja Pengendalian Internal Terintegrasi COSO. Secara khusus, penelitian ini mengkaji bagaimana proses pengelolaan utang dengan menerapkan lima unsur kontrol internal COSO, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, tindakan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta kegiatan pemantauan serta mengkaji kontribusi Ikhtisar Pemeriksaan Tagihan (IPT) sebagai mekanisme pengendalian internal dalam

meminimalkan risiko kesalahan pada proses verifikasi, pencatatan, dan pembayaran utang usaha.

2. KAJIAN TEORITIS

Utang Usaha

Utang usaha merupakan kewajiban suatu perusahaan yang timbul dari pembelian secara kredit yang memiliki batas waktu pembayaran (Septiani dkk., 2024). Wanda & Yuliati (2024), mendefinisikan utang adalah kewajiban yang belum dilunasi oleh suatu perusahaan atau debitur kepada pihak lain. Utang ini merupakan sumber modal atau dana yang diperoleh perusahaan dari para krediturnya. Sementara itu, Ledatu & Suryantari (2021) mengemukakan bahwa utang adalah tanggung jawab perusahaan yang muncul sebagai hasil dari suatu transaksi. Utang sangat bagian penting dalam manajemen keuangan perusahaan karena berkontribusi pada arus kas, hubungan dengan pemasok, dan kelancaran operasional perusahaan.

Menurut Lukito & Suhartini (2024), mekanisme utang usaha adalah prosedur sistematis yang digunakan oleh departemen akuntansi sebuah perusahaan untuk memenuhi kewajibannya atas pembelian yang dilakukan secara kredit dari pemasok tertentu berdasarkan ketentuan pembayaran yang telah ditetapkan. Proses pengelolaan utang usaha meliputi permintaan pembelian, pemesanan barang atau jasa, penerimaan barang, verifikasi dokumen tagihan, pencatatan utang, hingga pembayaran kepada vendor. Dalam praktiknya, pengelolaan utang usaha diawali dari penerimaan dokumen tagihan dari vendor yang disertai dengan dokumen pendukung, seperti *purchase requisition*, *purchase order*, *delivery order*, *receiving report*, *invoice supplier*, dan faktur pajak (Fajriah & Ikhsan, 2023).

Pengendalian Internal

Pengendalian internal merupakan serangkaian kebijakan dan prosedur yang dibuat dan dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen, dan seluruh karyawan dalam sebuah organisasi untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi. Menurut The Committee of Sponsoring Organizations (COSO, 2013) adalah prosedur yang dipengaruhi oleh dewan direksi entitas, manajemen, dan anggota staf lainnya dalam suatu organisasi, serta dimaksudkan memberikan sebuah keyakinan yang wajar terkait pencapaian tujuan yang

berkaitan dengan operasi, pelaporan, dan ketaatan atau kepatuhan. Penelitian oleh Adelia & Ratnawati (2025) menunjukkan bahwa pengendalian internal sangat penting bagi operasional bisnis karena dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan, penyimpangan, dan kecurangan.

Tujuan pengendalian internal menurut COSO (2013) mencakup tiga kategori, yaitu tujuan operasional yang berkaitan dengan efektif dan efisiennya operasional entitas, tujuan pelaporan yang berkaitan dengan pelaporan keuangan internal dan eksternal serta pelaporan non keuangan, serta tujuan kepatuhan yang berkenaan dengan kesesuaian terhadap ketentuan dan hukum yang berlaku. Menurut Tuwo & Pradnyani (2024), pengendalian internal utang *supplier* sangat penting bagi keberhasilan fungsi bisnis karena pembayaran yang tepat waktu dapat memengaruhi citra perusahaan, likuiditas, dan hubungan perusahaan dengan pemasok. Fitria & Raharjo (2025) menekankan bahwa digitalisasi proses verifikasi tagihan pada transaksi jasa dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi pengendalian internal, namun demikian elemen manusia dalam proses otorisasi tetap menjadi komponen yang tidak dapat diabaikan.

COSO Internal Control-Integrated Framework

COSO Internal Control-Integrated Framework pertama kali diterbitkan pada tahun 1992 dan kemudian mengalami pembaruan pada tahun 2013 sebagai respons terhadap perubahan lingkungan bisnis, regulasi, serta meningkatnya kebutuhan organisasi akan sistem pengendalian yang lebih komprehensif. Kerangka ini diakui secara luas sebagai standar global dalam perancangan, implementasi, dan evaluasi pengendalian internal. Dalam penelitian Ningsih & Hamzah (2021) tentang efektivitas sebuah sistem pengendalian internal PT Conex Inti Makmur, dimana analisis menggunakan kerangka kerja COSO menunjukkan bahwa kerangka tersebut mampu dimanfaatkan sebagai alat evaluasi untuk menemukan kelemahan dalam kontrol internal yang menyebabkan keterlambatan pembayaran utang jatuh tempo dan kurang optimalnya proses *monitoring*.

Selaras dengan penelitian tersebut, Wahyuandari & Putri (2023) menjelaskan bahwa komponen COSO sebagai prinsip dalam mengevaluasi efektivitas pengendalian internal suatu organisasi serta menilai kemampuannya dalam mengelola risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan. Selain itu, penelitian yang dilakukan Wea dkk. (2026) menunjukkan bahwa kerangka kerja COSO dapat dimanfaatkan sebagai alat

evaluasi untuk membandingkan kesesuaian antara praktik pengendalian internal yang diterapkan organisasi dengan kondisi ideal berdasarkan konsep teoritis. Menurut COSO (2013) menetapkan bahwa pengendalian internal yang efektif harus mencakup lima komponen yang saling berkaitan, yaitu *control environment*, *risk assessment*, *control activities*, *information and communication*, serta *monitoring activities*.

Control environment merupakan fondasi pengendalian internal yang mencerminkan integritas, etika, kompetensi, serta komitmen manajemen terhadap pengendalian internal. *Risk assessment* adalah proses identifikasi dan analisis risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi. *Control activities* merupakan serangkaian prosedur dan kebijakan yang digunakan untuk memastikan respons terhadap risiko telah dilaksanakan dengan baik, seperti pemisahan tugas, otorisasi transaksi, rekonsiliasi, verifikasi dokumen, dan pengendalian akses terhadap sistem informasi. *Information and communication* berkaitan komunikasi yang efektif di seluruh jenjang organisasi serta penyediaan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu. *Monitoring activities* merupakan proses pemantauan yang berkelanjutan digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pengendalian internal dan penyempurnaan terhadap sistem yang diterapkan.

3. METODE PENELITIAN

Metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus digunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji penerapan pengendalian internal utang usaha di PT XYZ, yang didasarkan pada COSO *Internal Control - Integrated Framework*. Studi kasus digunakan untuk memahami secara mendalam bagaimana penerapan pengendalian internal utang usaha yang berlangsung di perusahaan serta mengidentifikasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip COSO. Data penelitian diperoleh selama periode magang Januari sampai Juni 2026 melalui data primer dan data sekunder.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu

1. Observasi

Observasi dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan utang usaha di PT XYZ selama kegiatan magang. Peneliti mengamati alur proses utang usaha sejak dokumen tagihan diterima dari vendor hingga proses pembayaran. Pengamatan meliputi

proses pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukung, verifikasi kesesuaian dokumen dengan Purchase Order, Delivery Order, Laporan Penerimaan Barang, *invoice*, dan faktur pajak jika ada. Selain mengamati alur kerja, peneliti juga mengidentifikasi bentuk kontrol internal yang diterapkan perusahaan, seperti pemisahan tugas antarbagian, prosedur otorisasi dokumen, verifikasi sebelum pencatatan, serta mekanisme koordinasi antarbagian terkait. Hasil observasi digunakan untuk menggambarkan kondisi aktual penerapan pengendalian internal serta mengevaluasinya berdasarkan COSO Framework.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pertanyaan secara langsung kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengelolaan utang usaha. Informan penelitian terdiri atas *Staff Accounting*, *Staff Finance*, dan *Head of Finance Accounting*. Wawancara untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai prosedur, kebijakan, serta mekanisme pengendalian internal yang diterapkan dalam sistem utang usaha perusahaan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan menghimpun serta menelaah berbagai dokumen yang berkaitan dengan sistem utang usaha PT XYZ. Dokumen yang digunakan meliputi surat permintaan barang, *purchase order*, *delivery order*, laporan penerimaan barang, *invoice* atau tagihan, faktur pajak dan berita acara serah terima barang atau progress proyek jika ada. Hasil observasi dan wawancara divalidasi dengan data dokumentasi, sehingga informasi yang dihasilkan memiliki tingkat akurasi yang lebih baik.

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dianalisis dalam tiga tahapan, meliputi

1. Reduksi data

Tahap pertama mencakup pengurangan data dengan menyeleksi, mengelompokkan, dan merangkum data yang relevan dengan topik penelitian, selanjutnya semua data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan

dokumentasi dipilah, disederhanakan, dan difokuskan sesuai dengan relevansinya terhadap *COSO Framework*.

2. Penyajian data

Informasi yang telah melalui proses reduksi disajikan dalam bentuk uraian naratif dan tabel sehingga mempermudah pemahaman serta proses interpretasi. Penyajian data disusun berdasarkan komponen-komponen pengendalian internal COSO, sehingga keterkaitan antarkomponen dapat tergambarkan secara sistematis.

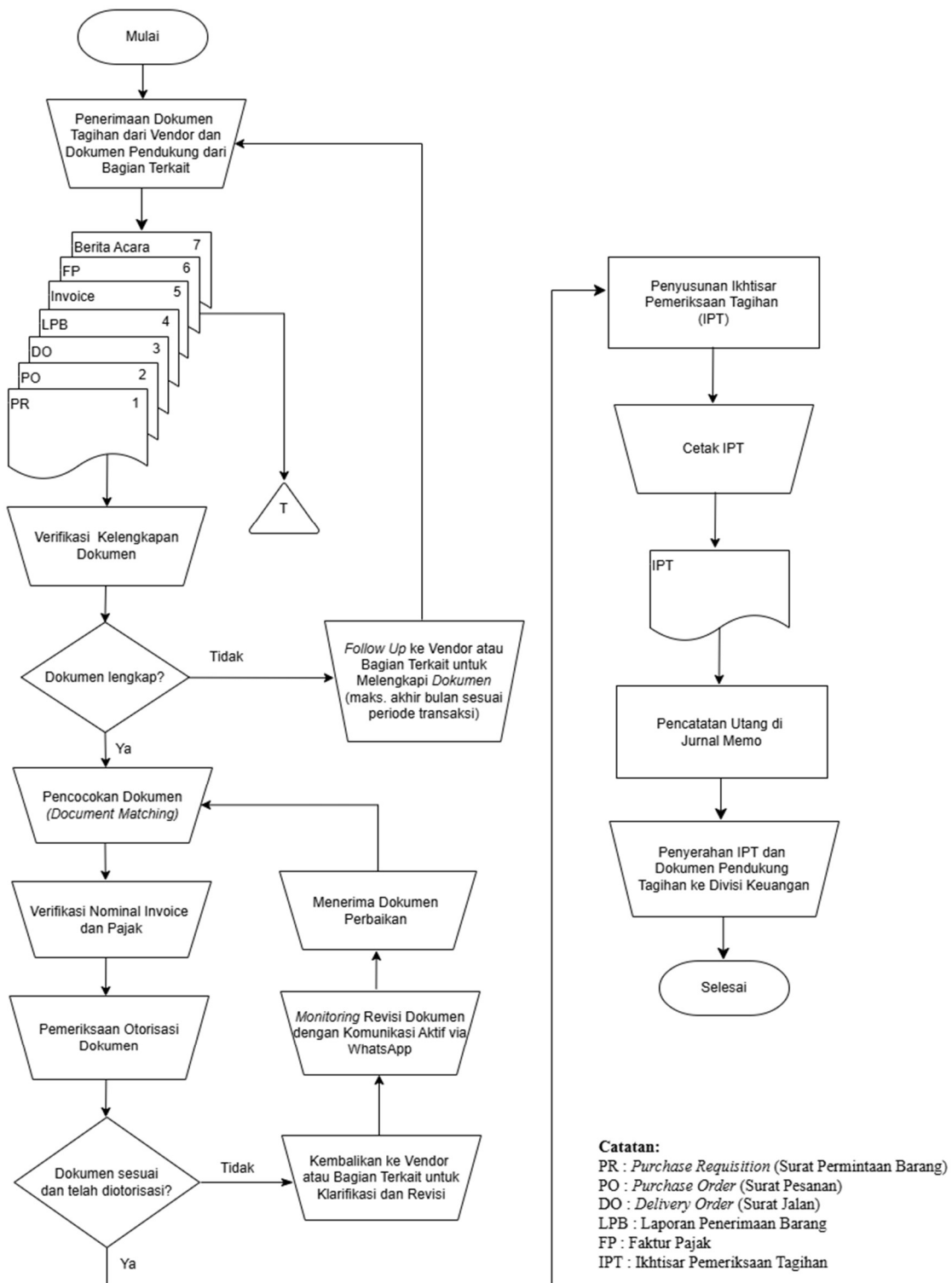
3. Penarikan kesimpulan

Tahap penarikan kesimpulan dilakukan dengan membandingkan temuan-temuan yang diperoleh pada praktik pengendalian internal utang usaha yang diterapkan PT XYZ dengan lima komponen *COSO Framework*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pengelolaan Utang Usaha pada PT XYZ

Utang usaha di PT XYZ timbul dari berbagai transaksi pengadaan kebutuhan operasional, seperti pembelian bahan baku, penggunaan jasa pihak ketiga, dan kebutuhan lainnya. Dalam pengakuannya, PT XYZ menerapkan dasar akrual (*accrual basis*), yaitu utang diakui pada saat perusahaan telah menerima barang atau jasa dan dokumen tagihan telah diverifikasi, meskipun pembayaran kepada vendor belum dilakukan. Penerapan dasar akrual ini sejalan dengan ketentuan PSAK 201 yang menyatakan bahwa laporan keuangan disusun atas dasar akrual, sehingga aset, liabilitas, pendapatan, dan beban diakui ketika memenuhi definisi serta kriteria pengakuan dalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2025). Dengan demikian, laporan keuangan dapat mencerminkan kondisi ekonomi yang sesungguhnya pada periode terjadinya transaksi.



Gambar 1. Prosedur Pengelolaan Utang Usaha PT XYZ

(Sumber: Data Diolah oleh Penulis, 2026)

Berdasarkan Gambar 1, prosedur pengelolaan utang usaha PT XYZ dimulai dari penerimaan dokumen tagihan dari vendor beserta dokumen pendukung dari bagian

terkait, yang terdiri dari Surat Permintaan Barang (*Purchase Requisition/PR*), *Purchase Order* (PO), Surat Jalan (*Delivery Order/DO*), Laporan Penerimaan Barang (LPB), *Invoice*, Faktur Pajak (FP), dan Berita Acara jika diperlukan. Selanjutnya, Divisi Akuntansi melakukan verifikasi kelengkapan dokumen. Apabila dokumen belum lengkap, dilakukan tindak lanjut (*follow up*) kepada vendor atau bagian terkait hingga dokumen dilengkapi. Setelah dokumen lengkap, proses dilanjutkan dengan pencocokan dokumen (*document matching*), verifikasi nominal *invoice* dan pajak, serta pemeriksaan otorisasi dokumen. Jika hasil verifikasi menunjukkan bahwa dokumen telah sesuai dan memperoleh otorisasi, maka proses dilanjutkan ke tahap penyusunan Ikhtisar Pemeriksaan Tagihan (IPT), namun apabila ditemukan ketidaksesuaian dokumen dikembalikan kepada vendor atau bagian terkait untuk dilakukan klarifikasi dan revisi. Proses tindak lanjut atas perbaikan dokumen tersebut dipantau secara aktif melalui *WhatsApp* hingga dokumen yang telah direvisi diterima kembali. Selanjutnya IPT disusun dan dicetak, dilakukan pencatatan utang melalui jurnal memo, dan selanjutnya IPT beserta dokumen pendukung diserahkan kepada Divisi Keuangan untuk diproses pada tahap pembayaran.

Analisis Pengendalian Internal Utang Usaha Berdasarkan COSO Framework

Analisis pengendalian internal utang usaha di PT XYZ dilakukan dengan mengacu pada kerangka kerja COSO yang terdiri dari lima komponen. Berdasarkan hasil wawancara, sebelum diterapkannya Ikhtisar Pemeriksaan Tagihan (IPT) sebagai bagian dari prosedur verifikasi, proses pengelolaan utang usaha masih lebih bergantung pada pemeriksaan manual terhadap dokumen pendukung. Kondisi tersebut menyebabkan potensi terjadinya *human error*, seperti kesalahan nominal *invoice*, ketidaksesuaian perhitungan PPN masukan maupun PPh Pasal 23, serta risiko pembayaran ganda apabila pemeriksaan dokumen tidak dilakukan secara menyeluruh. Setelah IPT diterapkan sebagai dokumen pengendalian internal, proses pemeriksaan menjadi lebih sistematis karena seluruh hasil verifikasi dirangkum dalam satu dokumen sebelum dilakukan pencatatan utang. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, kesalahan-kesalahan tersebut mengalami penurunan yang signifikan dan bahkan hampir tidak ditemukan dalam satu periode bulanan, sehingga meningkatkan keyakinan Divisi Finance bahwa tagihan yang diproses telah sesuai dengan dokumen pendukung dan nominal yang

seharusnya. Hasil analisis secara menyeluruh disajikan dalam Tabel 1, sedangkan pembahasan yang lebih rinci mengenai setiap komponen diuraikan pada subbab berikutnya.

Tabel 1. Hasil Analisis Pengendalian Internal Utang Usaha Berdasarkan COSO Framework

Komponen COSO	Temuan di PT XYZ	Indikator Pengendalian	Penilaian
Lingkungan Pengendalian (<i>Control Environment</i>)	Terdapat pemisahan fungsi yang jelas antara Divisi Akuntansi dan Divisi Keuangan dalam proses pengelolaan utang usaha.	Divisi Akuntansi bertanggung jawab atas verifikasi dan pencatatan utang; Divisi Keuangan bertanggung jawab atas pembayaran kepada Vendor.	Efektif - Terdapat pemisahan fungsi yang jelas antara Divisi Akuntansi dan Divisi Keuangan sehingga mengurangi peluang terjadinya konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang.
Penilaian Risiko (<i>Risk Assessment</i>)	Perusahaan mengidentifikasi risiko kesalahan pencatatan, pembayaran ganda, dan ketidaksesuaian dokumen.	Setiap <i>invoice</i> diwajibkan dilengkapi dokumen PR, PO, DO, LPB, faktur pajak, dan berita acara (jika ada) sebelum diproses.	Efektif - Setiap tagihan wajib dilengkapi dokumen pendukung sebelum diproses sehingga risiko pembayaran atas tagihan yang tidak sah maupun dokumen yang tidak lengkap dapat diminimalkan.
Aktivitas Pengendalian (<i>Control Activities</i>)	Verifikasi kelengkapan dokumen, pencocokan data antardokumen, pemeriksaan pajak (DPP, PPN, PPh Pasal 23), penyusunan IPT sebagai dokumen pengendalian, serta otorisasi berjenjang.	IPT digunakan sebagai dokumen pengendalian yang merangkum hasil pemeriksaan sebelum utang dicatat melalui jurnal memo.	Sangat efektif - IPT mewajibkan setiap tagihan melewati proses pemeriksaan kelengkapan dokumen, pencocokan <i>invoice</i> , verifikasi PPN Masukan dan PPh Pasal 23, serta otorisasi sebelum dicatat maupun dibayarkan. Berdasarkan hasil wawancara, setelah IPT diterapkan kesalahan administrasi menjadi sangat jarang terjadi.
Informasi dan Komunikasi (<i>Information and Communication</i>)	Informasi tagihan dikomunikasikan melalui PO, LPB, <i>invoice</i> , faktur pajak, IPT, dan jurnal memorial. IPT menjadi dokumen ringkasan hasil verifikasi yang digunakan sebagai dasar komunikasi antara Divisi Akuntansi dan Divisi Keuangan sebelum pembayaran dilakukan.	Koordinasi aktif antara vendor, Divisi Akuntansi, dan Divisi Keuangan melalui komunikasi langsung maupun WhatsApp apabila ditemukan ketidaksesuaian dokumen, serta penyampaian hasil	Efektif - IPT menjadi media komunikasi yang memastikan informasi hasil verifikasi tersampaikan secara lengkap kepada Divisi Finance sehingga pembayaran dapat diproses dengan tingkat keyakinan yang lebih tinggi.

Komponen COSO	Temuan di PT XYZ	Indikator Pengendalian	Penilaian
		verifikasi melalui IPT sebelum proses pembayaran dilakukan.	
Aktivitas Pemantauan (<i>Monitoring Activities</i>)	Pemeriksaan ulang terhadap IPT dan jurnal memo sebelum diserahkan ke Divisi Keuangan; penelusuran transaksi menggunakan IPT sebagai audit trail	Setiap transaksi diperiksa kembali untuk memastikan kesesuaian nominal, kode akun (COA), dan kelengkapan dokumen pendukung.	Efektif - seluruh transaksi diperiksa kembali menggunakan IPT dan jurnal memo sehingga kesalahan dapat dideteksi sebelum pembayaran dilakukan serta memudahkan penelusuran transaksi.

(Sumber: Data Diolah oleh Penulis, 2026)

Berdasarkan Tabel 1, kelima komponen COSO telah diterapkan di PT XYZ. Aktivitas pengendalian merupakan komponen paling dominan, didukung oleh lingkungan pengendalian yang kuat melalui pemisahan fungsi yang jelas antara Divisi Akuntansi dan Divisi Keuangan. Pembahasan detail setiap komponen diuraikan sebagai berikut.

Lingkungan Pengendalian (Control Environment)

Lingkungan pengendalian merupakan dasar utama dalam sistem pengendalian internal yang mencerminkan komitmen manajemen terhadap penerapan integritas, nilai-nilai etika, serta pembentukan struktur organisasi yang mendukung tercapainya tujuan perusahaan (COSO, 2013). Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, PT XYZ telah menerapkan pemisahan fungsi yang jelas antara Divisi Akuntansi yang bertanggung jawab atas verifikasi dokumen, penyusunan IPT, dan pencatatan utang melalui jurnal memorial, dengan Divisi Keuangan yang bertanggung jawab atas pembayaran kepada vendor. Pemisahan fungsi ini sesuai dengan prinsip *segregation of duties* yang dikemukakan Mulyadi (2016) dalam penelitian Panggabean dkk. (2025) sebagai salah satu elemen terpenting dalam pengendalian internal. Selain itu, perusahaan menerapkan prosedur kerja yang mewajibkan setiap transaksi didukung dokumen lengkap dan mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang sebelum diproses.

Penilaian Risiko (Risk Assessment)

Penilaian risiko meliputi proses identifikasi dan analisis risiko yang berpotensi menghambat tujuan perusahaan. PT XYZ telah mengidentifikasi beberapa risiko utama dalam pengelolaan utang usaha, antara lain kesalahan pencatatan transaksi, pembayaran

ganda, pembayaran atas tagihan yang tidak sah, kesalahan perhitungan pajak, dan pencatatan tagihan tanpa dukungan dokumen yang memadai. Upaya *mitigasi* dilakukan melalui proses verifikasi dokumen berlapis sebelum setiap tagihan diproses. Dokumen tagihan yang disyaratkan meliputi *purchase requisition* (PR), *purchase order* (PO), surat jalan (*delivery order*), laporan penerimaan barang (LPB), *invoice*, faktur pajak, serta dokumen pendukung lainnya seperti berita acara serah terima barang atau tanda terima.

Aktivitas Pengendalian (Control Activities)

Aktivitas pengendalian merupakan komponen yang paling dominan dalam sistem pengendalian internal utang usaha PT XYZ. Aktivitas ini mencakup tiga sub-aktivitas pengendalian utama yang diterapkan secara sistematis, yaitu verifikasi dokumen tagihan, penyusunan IPT, dan pencatatan utang melalui jurnal memo. Berikut penjelasan ketiga aktivitas pengendalian utama.

1. Verifikasi Dokumen Tagihan

Proses verifikasi dokumen tagihan dilaksanakan oleh Divisi Akuntansi terhadap setiap tagihan yang diterima dari vendor maupun bagian internal perusahaan. Verifikasi mencakup lima tahapan sebagaimana disajikan dalam Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Tahapan Verifikasi Dokumen Tagihan di PT XYZ

No.	Tahapan	Keterangan
1.	Pemeriksaan kelengkapan dokumen	Memeriksa ketersediaan PR, PO, DO, LPB, <i>invoice</i> , faktur pajak, dan berita acara serah terima barang atau progres proyek (jika ada).
2.	Pencocokan data transaksi	Mencocokkan nama vendor, nomor dokumen, tanggal transaksi, jenis barang atau jasa, kuantitas barang, harga satuan, total tagihan, serta syarat pembayaran.
3.	Verifikasi nominal pajak	Mengecek kesesuaian nilai DPP, PPN masukan, dan PPh Pasal 23 (untuk transaksi jasa).
4.	Pemeriksaan otorisasi	Memastikan dokumen telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai hierarki otorisasi.
5.	Tindak lanjut atas ketidaksesuaian	Menginformasi ketidaksesuaian kepada vendor atau bagian terkait; dokumen perbaikan harus diterima paling lambat akhir bulan berjalan.

(Sumber: Data Diolah oleh Penulis, 2026)

2. Penyusunan Ikhtisar Pemeriksaan Tagihan (IPT)

Setelah verifikasi dokumen dinyatakan sesuai, Divisi Akuntansi menyusun Ikhtisar Pemeriksaan Tagihan (IPT) menggunakan *template* Microsoft Excel yang sudah disediakan oleh perusahaan. IPT memuat informasi

tanggal penerimaan dokumen tagihan, nama vendor, jumlah tagihan, tanggal jatuh tempo, nomor dan tanggal faktur pajak, NPWP vendor, kode akun utang (COA), uraian barang atau jasa, nilai DPP, nilai PPN masukan, nomor *invoice*, serta kode akun lawan transaksi.

IPT merupakan dokumen kerja internal yang dikembangkan oleh PT XYZ sebagai mekanisme tambahan dalam proses pemeriksaan tagihan. Meskipun tidak diwajibkan dalam COSO *Framework* maupun standar akuntansi, keberadaan IPT menunjukkan upaya perusahaan dalam memperkuat proses pengendalian sebelum pencatatan dan pembayaran dilakukan. IPT berfungsi sebagai penghubung antara proses verifikasi dokumen dengan proses pencatatan akuntansi, sekaligus menyediakan jejak audit (*audit trail*) yang memudahkan penelusuran transaksi. Peran ganda IPT memperkuat komponen pengendalian informasi dan komunikasi secara bersamaan yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya.

3. Pencatatan Utang Usaha melalui Jurnal Memo

Pencatatan utang usaha dilakukan melalui jurnal memo berbasis Microsoft Excel. Pencatatan mencerminkan penerapan dasar akrual, di mana kewajiban diakui bersamaan dengan timbulnya hak atas barang atau jasa yang diterima. Terdapat dua pola jurnal yang diterapkan berdasarkan jenis transaksi. Untuk transaksi jasa yang dikenakan PPN dan PPh Pasal 23, jurnal yang dibuat melibatkan akun beban jasa (debit), PPN masukan (debit), utang PPh Pasal 23 (kredit), dan Utang usaha (kredit). Sementara itu, transaksi pembelian barang yang dikenakan PPN dicatat melalui akun persediaan atau aset atau beban terkait (debit), PPN masukan (debit), dan utang usaha (kredit). Setelah jurnal dibuat, dilakukan pemeriksaan ulang terhadap nominal, ketepatan kode akun (COA), dan perhitungan pajak sebelum IPT berserta dokumen pendukung diserahkan kepada Divisi Keuangan untuk diproses pada tahap pembayaran.

Informasi dan Komunikasi (Information and Communication)

Komponen informasi dan komunikasi pada PT XYZ diwujudkan melalui penggunaan berbagai dokumen sebagai media pertukaran informasi antara vendor, Divisi Akuntansi, dan Divisi Keuangan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau

ketidaklengkapan dokumen tagihan, informasi tersebut disampaikan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti kepada vendor. Vendor atau bagian terkait diwajibkan melengkapi atau memperbaiki dokumen paling lambat pada akhir bulan sesuai periode terjadinya transaksi. Proses tindak lanjut dilakukan melalui komunikasi aktif untuk memastikan seluruh dokumen telah lengkap sebelum tutup buku akhir bulan.

Salah satu media komunikasi yang berperan penting dalam proses tersebut adalah Ikhtisar Pemeriksaan Tagihan (IPT). Berdasarkan hasil wawancara, Divisi Finance menjadikan IPT sebagai dasar untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan yang diterima benar-benar berasal dari transaksi yang sah, telah diverifikasi kelengkapan dokumennya, serta telah diperiksa kesesuaian nominal *invoice* dan perhitungan pajaknya. Dengan demikian, Divisi Finance dapat memproses pembayaran dengan tingkat keyakinan yang lebih tinggi tanpa harus melakukan pemeriksaan ulang secara menyeluruh terhadap seluruh dokumen pendukung.

Aktivitas Pemantauan (Monitoring Activities)

Pemantauan dilakukan melalui pemeriksaan ulang terhadap seluruh dokumen tagihan, IPT, dan jurnal memo sebelum transaksi diproses ke tahap pembayaran. Melalui pemantauan yang berkelanjutan, PT XYZ dapat mendeteksi potensi kesalahan secara lebih dini sehingga risiko salah saji dalam pencatatan utang dapat diminimalkan. Hal ini mendukung pernyataan Tuanakotta (2019) bahwa pengendalian internal yang efektif bersifat preventif bukan hanya reaktif dalam mendeteksi penyimpangan.

Peran Ikhtisar Pemeriksaan Tagihan dalam Pengendalian Internal Utang

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah peran strategis IPT sebagai instrumen pengendalian internal utang yang belum banyak dibahas dalam literatur akademis. IPT tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, melainkan juga sebagai penghubung antara proses verifikasi dokumen dengan pencatatan akuntansi dan pembayaran, sehingga secara bersamaan memperkuat komponen Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*) dan Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*) dalam COSO Framework. Keberadaan IPT memastikan bahwa setiap tagihan yang dicatat telah melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu, memuat informasi transaksi yang lengkap dan terverifikasi, serta menyediakan jejak audit yang memudahkan proses

pengawasan dan penelusuran transaksi dikemudian hari. Dengan demikian, IPT berkontribusi signifikan terhadap efektivitas pengendalian internal utang usaha secara keseluruhan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis kelima komponen COSO, PT XYZ telah menerapkan pengendalian internal yang mencakup keseluruhan komponen tersebut, yaitu lingkungan pengendalian yang terbentuk melalui pemisahan fungsi antara Divisi Akuntansi dan Divisi Keuangan, penilaian risiko yang diwujudkan melalui kewajiban kelengkapan dokumen sebelum tagihan diproses, aktivitas pengendalian yang berpusat pada verifikasi dokumen dan penguatan Ikhtisar Pemeriksaan Tagihan (IPT), informasi dan komunikasi yang berjalan melalui dokumen serta koordinasi langsung dengan vendor atau bagian terkait, dan aktivitas pemantauan melalui pemeriksaan ulang sebelum proses pembayaran dilaksanakan.

Ikhtisar Pemeriksaan Tagihan (IPT) terbukti menjadi instrumen sentral dalam sistem pengendalian internal utang usaha PT XYZ. Dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai ringkasan hasil verifikasi tagihan, tetapi juga sebagai penghubung antara proses pemeriksaan dokumen dengan proses pencatatan akuntansi, serta sebagai sarana penelusuran transaksi apabila diperlukan pemeriksaan kembali di kemudian hari.

Meskipun pengendalian internal yang diterapkan PT XYZ secara umum telah memenuhi prinsip-prinsip COSO, proses verifikasi dan pencatatan utang usaha masih dilaksanakan secara manual melalui Microsoft Excel tanpa dukungan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi. Kondisi ini menyebabkan efektivitas pengendalian sangat bergantung pada ketelitian dan konsistensi pelaksanaan prosedur oleh staf, sehingga masih terdapat risiko kesalahan administratif dalam proses pengelolaan utang usaha.

Saran

PT XYZ disarankan untuk mempertahankan praktik pemisahan fungsi dan prosedur verifikasi tagihan yang telah berjalan baik, serta mempertimbangkan pengembangan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi untuk mendukung proses verifikasi tagihan, pencatatan akuntansi, dan pembayaran. Langkah ini dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, serta mengurangi risiko kesalahan yang timbul dari proses manual. Selain itu,

perusahaan perlu meningkatkan koordinasi dengan vendor terkait ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen tagihan agar proses verifikasi dan pencatatan dapat berjalan lebih lancar, terutama pada periode tutup buku akhir bulan. Penelitian ini hanya berfokus pada satu perusahaan dengan periode pengamatan yang relatif singkat. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek kajian pada beberapa perusahaan sejenis, menggunakan pendekatan kuantitatif atau campuran agar efektivitas pengendalian internal dapat diukur secara lebih objektif.

DAFTAR REFERENSI

- Adelia, E., & Ratnawati, D. (2025). Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Prosedur Pengeluaran Kas: Studi Pada Perusahaan Properti. *Jurnal Akuntansi Manajemen Ekonomi dan Kewirausahaan*, 5(3), 507–516. <https://doi.org/https://doi.org/10.47065/jamek.v3i1.2084>
- Akil, A., Tumanan, M., & Alfarisi, Muh. N. (2025). Analisis Kasus Siklus Akuisisi dan Pembayaran dalam Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Internal Perusahaan. *Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*, 11(4), 232–247. <https://doi.org/10.36989/didaktik.v11i04.8349>
- COSO. (2013). *COSO Internal Control-Integrated Framework (2013)*.
- Fajriah, W., & Ikhsan, M. (2023). Prosedur Pembayaran Utang Usaha kepada Vendor di Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI). *Seminar Nasional Riset Terapan*, 12(1), 61–69.
- Fitria, B. A., & Raharjo, Y. (2025). Digitalisasi pada Proses Verifikasi Tagihan Transaksi Jasa Menggunakan Sistem Informasi Akuntansi PT Petrokimia Gresik. *Jurnal Akuntansi Manajemen Ekonomi dan Kewirausahaan*, 5(3), 647–655. <https://doi.org/https://doi.org/10.47065/jamek.v3i1.2194>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2025). *PSAK 201 Penyajian Laporan Keuangan*. Jakarta: IAI.
- Ilhami, M. W., Vera Nurfajriani, W., Mahendra, A., Sirodj, R. A., & Afgani, W. (2024). Penerapan Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(9), 462–469. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11180129>
- Latha, N. P. C., & Suarjana, I. W. (2026). Analisis Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengeluaran Kas pada Hotel Citadines Berawa Beach Bali. *Prosiding Sintesa*, 6, 721–724.
- Ledatu, L. R., & Suryantari, E. P. (2021). Tinjauan Prosedur Utang Usaha pada PT. Massindo Solaris Nusantara Cabang Bali. *Prosiding Sintesa*, 4(21), 345–348.
- Lukito, A. R., & Suhartini, D. (2024). Mekanisme Pengelolaan Utang Usaha Oleh Account Payable Pada ZZ Hotel di Surabaya. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(8), 334–350. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jiem.v2i8.2195>

- Manzala, A., & Tannar, O. (2024). Analisis Penerapan Pengendalian Internal Pencatatan Pengeluaran Kas Atas Utang Yang Terotomatisasi. *Economics And Business Management*, 3(04), 558–565. <https://ejournal-rmg.org/index.php/EBMJ/article/view/259/301>
- Ningsih, D. S., & Hamzah, M. I. (2021). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pembelian Dan Pembayaran Bahan Baku Secara Tunai Dan Kredit Guna Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Internal Pada Pt Conex Inti Makmur. *Jurnal Ekonomi Bisnis Indonesia*, 16(2), 83-99.
- Panggabean, D. F. L., Fatahurrazak, & Haryadi, T. (2025). Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pembelian, Penjualan, dan Penggajian pada PT Capella Dinamik Nusantara Cabang Tanjungpinang. *Journal of Business and Economics (BJBE)*, 1(1). <https://bisnomi.com/index.php/bjbe/>
- Putra, A. P. P., & Nuryatno, M. (2022). Analisis Sistem Pengendalian Internal Terhadap Siklus Pengeluaran Kas Untuk Pembayaran Utang Usaha (Studi Pada Pt. Oyo Rooms Indonesia). *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 3(08), 697–711. <https://doi.org/10.36418/japendi.v3i08.1101>
- Saniyyah, A., Widodo, D., & Nuraeni, Y. (2024). Kajian Proses Pencatatan Utang Usaha Pada Divisi Account Payable Di PT Gobel Dharma Sarana Karya. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(9), 244–248. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i9.2475>
- Septiani, N. K., Widawati, I. A. P., & Septiviari, A. A. I. M. (2024). Analisis Prosedur Pembayaran Utang Supplier di Hotel X. *Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 4(3), 1109–1123. <https://doi.org/10.37481/jmneb.v4i3.868>
- Setyawati, N. M. A., Damayanti, T., & Mareni, N. K. (2024). Analisis Efektivitas Pengendalian Internal Pembayaran Utang Supplier di Hotel XYZ. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 2(12), 690–712. <https://jurnal.kolibi.org/index.php/neraca>
- Siboro, C. H. , & Sundari, S. (2025). Identifikasi Tantangan dan Solusi dalam Sistem Pembayaran Utang Usaha pada PT Intidaya Dinamika Sejati. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(10), 133–141. <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i10.6736>
- Tuanakotta, T. M. (2019). *Audit Internal Berbasis Risiko*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tuwo, C. F., & Pradnyani, N. L. P. S. P. (2024). Analisis Efektivitas Pengendalian Internal Pembayaran Utang Supplier pada Fashion Hotel Legian. *Prosiding Sintesa*, 7(2024), 321–328.
- Wahyuandari, W., & Putri, H. N. (2023). Analisis Sistem Pengendalian Internal Piutang. *Journal of Accounting and Tax*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.36563/jat.v2i1.782>
- Wanda, A., & Yuliati, A. (2024). Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Atas Prosedur Pembayaran Utang Jangka Pendek Kepada Supplier PT BSM. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 1(2), 768–774. <https://doi.org/10.61722/jemba.v1i2.398>

- Wea, T., Dince, M. N., & Lamawitak, P. L. (2026). Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Kas melalui Cash Opname. *Projemen UNIPA*, 13(1), 111–133. <https://doi.org/10.59603/projemen.v12i1.1230>
- Yusmi, A., & Sumarna, A. D. (2023). Rancangan Proses Bisnis Berbasis Pengendalian Internal Untuk Meminimalisir Keterlambatan Pembayaran Hutang Vendor. *Journal of Business Finance and Economic (JBFE)*, 4(2), 2023. <https://journal.univetbantara.ac.id/index.php/jbfe>